

BAB III

OBJEK PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya.

Penelitian pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya ini dilakukan karena Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan koordinator pengelola Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya sehingga data-data yang diperlukan oleh penulis untuk penelitian dapat diketahui dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya.

3.1.1 Sejarah Berdirinya Kota Tasikmalaya

Sejarah berdirinya Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonomi tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah Kabupaten induknya. Sebelumnya, kota ini yaitu ibukota dari Kabupaten Tasikmalaya, kemudian meningkat statusnya menjadi Kota Administratif tahun 1976, pada waktu A. Bunyamin menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya, dan kemudian menjadi pemerintahan Kota Tasikmalaya pemerintah kota yang mandiri pada masa pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin oleh bupatinya saat itu H. Suljana W.H.

Tonggak sejarah lahirnya Kota Tasikmalaya, mulai digulirkan ketika Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh A. Bunyamin, Bupati Tasikmalaya periode

tahun 1976-1981. Pada saat itu melalui peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976 diresmikanlah Kota Administratif Tasikmalaya oleh Menteri Dalam Negeri yang pada waktu itu dijabat oleh H. Amir Machmud. Walikota Administratif pertama adalah Drs. H. Oman Roosman, yang dilantik oleh Gubernur Jawa Barat, H. Aang Kunaefi.

Pada awal pembentukannya, wilayah Kota Administratif Tasikmalaya meliputi 3 Kecamatan yaitu Cipedes, Cihideung, dan Tawang dengan jumlah desa sebanyak 13 desa. Kemudian pada tahun 2001, dirintislah pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya oleh Bupati Tasikmalaya, Kol. Inf. H. Suljana Wirata Hadisubrata (1996-2001), dengan membentuk sebuah Tim Sukses Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diketuai oleh H. Yeng Ds. Partawinata SH. Melalui proses panjang akhirnya dibawah pimpinan Bupati Drs. Tatang Farhanul Hakim, pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001, pembentukan pemerintahan Kota Tasikmalaya sebagai pemerintahan daerah otonom ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI di Jakarta bersama-sama dengan Kota Lhoksumawe, Langsa, Padangsidempuan, Prabumulih, Lubuk Linggau, Pager Alam, Tanjung Pinang, Cimahi, Batu, Sikawang dan Bau-bau. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2001 pelantikan Drs. Wahyu Suradiharja sebagai Pejabat Walikota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate Bandung.

Melalui Surat Keputusan No. 133 Tahun 2001, tanggal 13 Desember 2001 Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya (PPK-DPRD), selanjutnya pengangkatan

anggota DPRD Kota Tasikmalaya disahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat, No. 171/Kep.380/Dekon/2002, tanggal 26 April 2002, dan pada tanggal 30 April 2002 keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya pertama diresmikan. Kemudian pada tanggal 14 November 2002, Drs. H. Bubun Bunyamin dilantik sebagai Walikota Tasikmalaya, sebagai hasil dari tahapan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh legislatif.

Sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 bahwa wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 15 dan Desa sebanyak 54, tetapi dalam perjalanannya melalui Perda No. 30 Tahun 2003 tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa-desa dilingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi Kelurahan, oleh karena itu maka jumlah Kelurahan menjadi sebanyak 69 Kelurahan, sedangkan untuk Kecamatan bertambah menjadi 10 Kecamatan, antara lain :

- a. Kecamatan Bungursari
- b. Kecamatan Cibeureum
- c. Kecamatan Cihideung
- d. Kecamatan Cipedes
- e. Kecamatan Indihiang
- f. Kecamatan Kawalu
- g. Kecamatan Mangkubumi
- h. Kecamatan Purbaratu
- i. Kecamatan Tamansari
- j. Kecamatan Tawang

3.1.2 Visi dan Misi Kota Tasikmalaya

1. Visi

Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju dan Madani.

2. Misi

- a. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal.
- b. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- c. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
- d. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

3.1.3 Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya

Sejalan dengan pembentukannya Kota Administratif Tasikmalaya tanggal 3 November 1976 yang meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Cihideung, Cipedes, dan Tawang. Dalam melaksanakan pemungutan pendapatan di Wilayah Kota Administratif dibentuk Cabang Dinas Perpajakan dan Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya, dengan dasar pada keputusan Bupati No. SK.B.I/Peg.I/136-Sek/Str- Org/Paj/72, tentang pembentukan Dinas Perpajakan dan Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 2 Maret 1973, No. 78/A-V/18/Perund/SK/1973.

Kewenangan pemungutan antara lain Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan. Retribusi Daerah meliputi Retribusi Angkutan Sampah, Pemakaman, Parkir Kendaraan Bermotor, Sewa Tanah, Penyedotan Kakus, Sempadan (IMB), IMB Pemutihan, *Advice Planning*, Izin Gangguan, dan Sumbangan Pihak III dari SITU.

Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tasikmalaya tanggal 17 Oktober 2001 maka Pemerintah Daerah membentuk Kantor Pendapatan Kota Tasikmalaya. Berdasarkan Surat Keputusan Pj. Walikota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2001.

Selanjutnya menghadapi tuntutan dan tantangan dalam rangka penggalian pendapatan bagi pemerintah daerah Kota Tasikmalaya yang baru terbentuk, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tanggal 21 Oktober 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya, kantor pendapatan Kota Tasikmalaya ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Pendapatan dimana resminya secara definitif ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2004 dengan dilantiknya kepala dinas (Eselon II) dengan perangkat di bawahnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terjadi perubahan status Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

3.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Tugas pokok dinas adalah melaksanakan sebagian urusan administratif keuangan daerah dibidang pajak daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pendapatan Daerah yang saat ini berubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak daerah;
- b. Pengendalian dan pengawasan pajak daerah;
- c. Pengoordinasian tata kerja dan tata hubungan kerja dibidang pajak daerah;
- d. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
- e. Pelaksanaan penggalian potensi pajak daerah dan penyuluhan dan sosialisasi pajak;
- f. Pelaksanaan kerjasama dalam rangka penggalian potensi pajak daerah;
- g. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan;
- h. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dibidang pajak daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1.5 Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

1. Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan program kerja badan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Bidang PBB dan BPHTB membawahkan :

- a. Seksi pendaftaran dan penetapan PBB dan BPHTB;
- b. Seksi pembukuan dan penagihan PBB dan BPHTB; dan
- c. Seksi pengendalian dan pembinaan pengelolaan PBB dan BPHTB.

4. Bidang Pajak Daerah Lainnya

Bidang pajak daerah lainnya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah selain PBB serta BPHTB.

Bidang Pajak Daerah Lainnya, Membawahkan :

- a. Seksi pendaftaran dan penetapan pajak daerah lainnya;

- b. Seksi pembukuan dan penagihan pajak daerah lainnya; dan
- c. Seksi pengendalian dan pembinaan pengelolaan pajak daerah lainnya.

5. Unit Pelaksana Teknis Badan

Tugas pokok dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas sesuai kebutuhan.
- b. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- d. Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Menurut Sugiyono (2013: 2), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian studi empiris yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak reklame dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013:147).

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel adalah gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:58).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis pada besarnya pengaruh yang ditimbulkan variabel independen terhadap variabel dependen., dimana variabel tersebut disesuaikan dengan judul skripsi penulis yaitu: “Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya)”. Variabel- variabel sehubungan dengan judul yang diajukan yaitu :

1. Variabel Bebas (*Independen*)

Variabel bebas yaitu variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (Sugiyono, 2013:59). Bahkan variabel independen merupakan variabel yang keberadaannya menjadi faktor penyebab yang dapat

mempengaruhi variabel lain, dalam hal ini variabel dependennya. Dalam penelitian ini yang dijadikan variabel independen adalah :

- Pajak Reklame (X1), indikatornya yaitu :

Jumlah penerimaan Pajak Reklame

- Pajak Hiburan (X2), indikatornya yaitu :

Jumlah penerimaan Pajak Hiburan

2. Variabel Terikat (*Dependen*)

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013:59). Dalam penelitian ini yang dijadikan variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah (Y).

Yang menjadi indikator dari variabel ini adalah :

Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah.

Untuk lebih jelasnya mengenai variabel penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

| Variabel | Definisi Variabel | Indikator | Skala |
|---|---|---------------------------------|-------|
| Pajak Reklame (X1) | Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial mempekenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. | Jumlah Penerimaan Pajak Reklame | Rasio |
| (Perda Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014) | | | |

| | | | |
|---------------------------------|---|---|-------|
| Pajak Hiburan (X ₂) | Pajak Hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut. (Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2003) | Jumlah Penerimaan Pajak Hiburan | Rasio |
| Pendapatan Asli Daerah (Y) | Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) | <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah • Retribusi Daerah • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan • Lain-Lain PAD yang sah | Rasio |

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis data yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data dimana penelitian ini dilaksanakan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari literatur dan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian sehingga dapat dipakai sebagai dasar analisa.

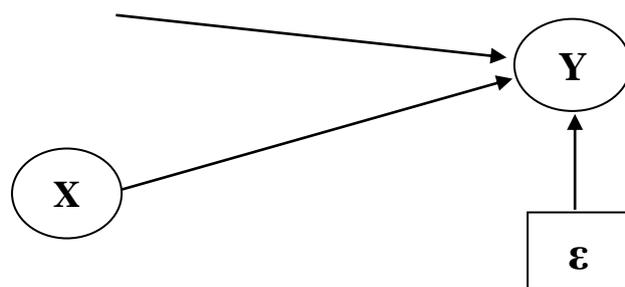
2. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian. Sehingga dapat diketahui situasi perusahaan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dan bertatap muka langsung dengan pihak yang terkait.
- b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian serta mencatat terhadap data yang diperoleh.
- c. Dokumentasi, yaitu dengan cara meneliti data yang terkumpul di perusahaan.

3.3 Model atau Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menghubungkan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis, dan jumlah hipotesis serta teknik analisis statistik yang digunakan (Sugiyono, 2013:8). Dalam hal ini, sesuai dengan judul penelitian yakni “Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah”, maka paradigma penelitiannya adalah :



Gambar 3.1
Paradigma Penelitian

Keterangan :

X_1 = Pendapatan Pajak Reklame

X_2 = Pendapatan Pajak Hiburan

Y = Pendapatan Asli Daerah

ε = Faktor-faktor lain yang tidak diteliti

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang mendasari penggunaan analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik yang mendasari dalam penggunaan regresi mencakup :

3.4.1.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2012:160) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal.

3.4.1.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2012:105) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilihat dari barisan VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. *Tolerance* mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\geq 0,01$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$.

3.4.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2012:139) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

3.4.1.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2012:110) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji *Durbin Watson* dengan membandingkan nilai

Durbin Watson hitung (d) dengan nilai *Durbin Watson* table, yaitu batas atas (d_u) dan batas bawah (d_L). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika $0 < d < d_L$, maka terjadi autokorelasi positif.
2. Jika $d_L < d < d_u$, maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
3. Jika $d - d_L < d < 4$, maka terjadi autokorelasi negatif.
4. Jika $4 - d_u < d < 4 - d_L$, maka tidak terjadi kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
5. Jika $d_u < d < 4 - d_u$, maka tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

3.4.2 Analisis Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda menurut Sugiyono (2015:192) adalah :

“suatu analisis untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel dependen mempengaruhi terhadap variabel independen”.

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah

X_1 = Pajak Reklame

X_2 = Pajak Hiburan

a = Nilai Konstanta

b = Koefisien regresi

3.4.3 Analisis Korelasi Berganda

Analisis korelasi yaitu untuk mengetahui keeratan hubungan antara kedua variabel yang dianalisis, dimana hubungan dinyatakan oleh besarnya angka koefisien korelasi dan arah dinyatakan oleh tanda positif atau negatif. Koefisien korelasi dirumuskan sebagai berikut :

$$R_{yx_1x_2} = \sqrt{\frac{r^2_{yx_1} + r^2_{yx_2} - 2r_{yx_1}r_{yx_2}r_{x_1x_2}}{1 - r^2_{x_1x_2}}}$$

(Sugiyono, 2013: 228)

Keterangan :

$R_{yx_1x_2}$ = Korelasi antara X_1 dan X_2 bersama-sama dengan Y

r_{yx_1} = Koefisien korelasi antara Y dengan X_1

r_{yx_2} = Koefisien korelasi Y dengan X_2

$r_{x_1x_2}$ = Koefisien korelasi antara X_1 dan X_2

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang diperoleh dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat dilihat pada ketentuan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pedoman untuk Memberikan Interpretasi
Terhadap Koefisien Korelasi

| Interval Koefisien | Tingkat Hubungan |
|--------------------|------------------|
| 0,00 – 0,199 | Sangat Rendah |
| 0,20 – 0,399 | Rendah |
| 0,40 – 0,599 | Sedang |
| 0,60 – 0,799 | Kuat |
| 0,80 – 1,000 | Sangat Kuat |

(Sugiyono, 2013:250)

3.4.4 Analisis Koefisien Determinasi

Merupakan pengkuadratan dan nilai korelasi (r^2). Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Kdr = r^2 \times 100\% \text{ (Sugiyono, 2013:229)}$$

Keterangan :

Kd= Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien korelasi dikuadratkan

3.4.5 Pengujian Hipotesis

3.4.5.1 Uji-t

Uji-t dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat bermakna atau tidak.

Pengujian hipotesis untuk uji-t adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Hipotesis Operasional

$H_0 : \rho_{YX_1} = 0$ Pajak Reklame secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$H_a : \rho_{YX_1} \neq 0$ Pajak Reklame secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$H_0 : \rho_{YX_2} = 0$ Pajak Hiburan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$H_a : \rho_{YX_2} \neq 0$ Pajak Hiburan secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Menentukan tingkat/taraf signifikansi atau derajat keyakinan

Hipotesis ini diuji dengan menggunakan tingkat/taraf signifikansi atau derajat keyakinan sebesar 5% (0,05).

3. Kaidah Keputusan :

a. Jika nilai sig < 0,05, atau t hitung > t tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

b. Jika nilai sig > 0,05, atau t hitung < t tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

3.4.5.2 Uji-f

Uji-f dilakukan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian hipotesis untuk uji-f adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan Hipotesis Operasional

$H_0 : \rho_{YX_1X_2} = 0$ Pajak Reklame dan Pajak Hiburan secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$H_a : \rho_{YX_1X_2} \neq 0$ Pajak Reklame dan Pajak Hiburan secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Menentukan tingkat/taraf signifikansi atau derajat keyakinan

Hipotesis ini diuji dengan menggunakan tingkat/taraf signifikansi atau derajat keyakinan sebesar 5% (0,05).

3. Kaidah Keputusan

- a. Jika nilai sig < 0,05, atau F hitung > F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.
- b. Jika Jika nilai sig > 0,05, atau F hitung < F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.